

KEGIATAN DPR-RI PERTENGAHAN DESEMBER 2011

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Laporan kegiatan pertengahan Desember ini fokus pada 3 Sidang paripurna DPR, tanggal 13, 15 dan 16 Desember. Acara Rapat Paripurna DPR tanggal 13 Desember adalah: *pertama*, Laporan Tim Bencana Alam Prov. Jabar, Sumbar, dan Jambi; *kedua*, Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; *ketiga*, laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan Calon Deputy Gubernur BI; dan *keempat*, pengambilan keputusan terhadap 3 RUU inisiatif DPR. Acara Rapat Paripurna tanggal 15 Desember adalah: *pertama*, laporan BAKN mengenai hasil kerja tahun 2011; *kedua*, laporan Komisi VII mengenai hasil *fit and proper test* Ketua dan Anggota BPH Migas; dan *ketiga*, laporan Tim Pemantau Pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan UU tentang Otsus Papua, dan laporan Tim Khusus Penanganan TKI. Sementara, agenda Rapat Paripurna tanggal 16 Desember adalah: *pertama*, Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Pengadaan Tanah, *kedua*, Laporan Baleg tentang Penetapan Prolegnas 2012; *ketiga*, Laporan Tim Pengawas Kasus Bank Century; dan *keempat*, Pidato Penutupan Masa Sidang II.

RAPAT PARIPURNA DPR TANGGAL 13 DESEMBER

Agenda pertama adalah laporan Tim Pengawas Bencana Alam. Laporan Tim Pengawas Bencana Alam Prov. Jabar merekomendasikan antara lain; menghimbau kepada BNPB untuk segera menyalurkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan rusak sedang dan berat tahap II tahun 2011; perlu dilakukan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Jabar pada sektor infrastruktur dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong perbaikan bidang infrastruktur; dan per-



lunya perhatian khusus dari Kemendagri kepada Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan keuangan terbatas dalam memenuhi kewajibannya menyediakan anggaran bantuan terhadap rumah rusak ringan.

Laporan Tim Pengawas Bencana Alam Prov. Sumbar merekomendasikan antara lain; perlunya percepatan proses penyediaan anggaran untuk penanganan bencana, namun tetap perlu verifikasi dalam setiap pencairan anggaran dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik serta menghindari adanya tebang pilih dalam pembiayaan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

Laporan Tim Pengawas Bencana Alam Prov. Jambi merekomendasikan; perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jambi, baik pembangunan fisik maupun non-fisik dengan mengkoordinasikan perhitungan besaran dampak bencana serta rencana kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi antardepartemen dan Pemda; perlu percepatan proses penyediaan anggaran untuk penanganan tahap selanjutnya dengan tetap melakukan verifikasi dan evaluasi pada setiap pencairan anggaran; Pemerintah Pusat diharapkan dapat memaksimalkan dana alokasi bencana alam ke daerah sehingga rekonstruksi pembangunan tetap berjalan cepat.

Pada agenda *kedua*, Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran diputuskan bahwa Pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk tidak melakukan perubahan atas UU No. 17 tahun 2008.

Pada agenda *ketiga*, Komisi XI melaporkan hasil pembahasan Calon Deputy Gubernur BI yang telah di seleksi untuk mengisi kekosongan 2 (dua) Deputy Gubernur Bank Indonesia. Melalui *fit and proper test* oleh Komisi XI, dilanjutkan dengan pemungutan suara, terpilih 2 (dua) di antara 4 (empat) calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu Dr. Ronald

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnu Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



Waas, dan Dr. Muliaman D. Hadad. Rapat paripurna memberikan persetujuan atas hasil pemilihan ini.

Pada agenda *keempat*, DPR menyetujui untuk pengambilan keputusan terhadap 3 RUU inisiatif dari Komisi dan Baleg menjadi RUU DPR, yaitu RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, RUU tentang Jaminan Produk Halal, dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

RAPAT PARIPURNA DPR TANGGAL 15 DESEMBER

Agenda pertama mengenai Laporan BAKN mengenai hasil kerja tahun 2011. Dalam laporan disebutkan bahwa BAKN harus diposisikan sebagai ujung tombak DPR dalam usaha memahami masalah-masalah keuangan negara yang diinformasikan oleh BPK ataupun berbagai pihak lainnya. BAKN diharapkan mampu menjadi interface dalam hubungan antara DPR dan BPK. Dalam kedudukannya yang demikian, BAKN diharapkan mampu melakukan pendekatan dan mendorong BPK untuk menyajikan informasi sesuai kebutuhan DPR, bukan sekedar memenuhi kaidah-kaidah atau sesuai analisis akuntansi pemerintah. Hal ini penting agar informasi/laporan BPK benar-benar bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana pengawasan DPR sesuai keinginan UUD 1945. Laporan BAKN ini merekomendasikan antara lain: [1] dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara, BAKN harus dapat menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat; [2] BAKN perlu memperbanyak investigasi terhadap temuan BPK-RI yang krusial dan mendapat perhatian masyarakat agar lebih jelas dan terarah, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; [3]

dalam memberikan masukan kepada BPK-RI, BAKN harus memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat dan mempunyai resiko tinggi dalam penyelenggaraan keuangan nagera; dan [4] BAKN lebih aktif berkoordinasi dengan Komisi dan/atau AKD lainnya dalam rangka mengoptimalkan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Agenda *kedua*, laporan Komisi VII mengenai *fit and proper test* Ketua dan Anggota BPH Migas untuk masa jabatan 2011-2015, dilaporkan bahwa melalui *fit and proper test*, telah terpilih 9 nama yaitu: Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA (Ketua); Dr. M. Fanshurullah Asa, M.T.; Fahmi Harsandono, S.E.; Drs. Sumihar Panjaitan; Ir. Saryono Hadiwidjoyo, SE, MBA; Mayjend. TNI (Purn) Karseno, MBA; Drs. Martin Samodra Ritonga; Dr. Ibrahim Hasyim, SE. MM; dan Ir. Drs. A. Qoyum Tjandranegara Ing. Ec. Rapat paripurna memberikan persetujuan terhadap nama-nama tersebut untuk menjadi Anggota BPH Migas untuk masa jabatan 2011-2015.

Agenda *ketiga*, laporan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Disampaikan, bahwa mengenai UU No. 11 tahun 2006 mengamanatkan dibentuknya 9 PP dan 3 Perpres sebagai tindak lanjut atas UU ini dalam waktu paling lambat 2 tahun. Namun, sampai saat ini baru 4 PP dan 2 Prepres yang dibentuk. Oleh karena itu, berkaitan dengan terdapatnya 5 RPP yang belum dibentuk, dengan rincian 2 RPP masih dalam proses pembahasan dan 3 RPP belum diajukan serta 1 Perpres yang masih dalam proses pembahasan, maka Tim Pemantau mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan semua peraturan perundang-undangan yang diamanatkan UU ini, agar Otonomi Khusus Aceh dapat berjalan efektif dan mendorong masuknya investasi ke Provinsi Aceh yang pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian. Laporan ten-

tang Program Pembangunan pasca-tsunami oleh BRR, terungkap bahwa bangunan sangat memprihatinkan sehingga perlu perhatian dari pemerintah. Untuk persiapan Pilkada Aceh, diungkapkan bahwa permasalahan utama menjelang Pilkada adalah perselisihan mengenai putusan MK yang membatalkan Pasal 256 UU No. 11 tahun 2006 yang melarang adanya calon dari kalangan independen.

Sementara, untuk Pengawasan Pelaksanaan Khusus di Papua, dilaporkan bahwa pemberian Otsus bagi Papua belum memperlihatkan hasil signifikan antara keinginan para pembentuk UU dengan implementasinya. Hal ini terlihat dari masyarakat asli Papua yang belum terjangkau secara memadai dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian, serta terbatasnya penyediaan prasarana dan sara publik, sehingga masih rendahnya tingkat kesejahteraan. Masyarakat asli Papua merasa terisolasi, terbelakang dan tertinggal dibanding masyarakat Indonesia umumnya.

Tim Khusus Penanganan TKI melaporkan, bahwa Tim Khusus Penanganan TKI telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain Raker dan RDP dengan instansi terkait. Juga telah melakukan kunjungan lapangan dan investigasi, yaitu: [1] kunjungan ke bandara Internasional Soekarno-Hatta pada saat penjemputan TKI overstayers yang dipulangkan dari Arab Saudi, [2] kunjungan ke Arab Saudi untuk mengawasi secara langsung proses pemulangan 2.927 orang TKI overstayers yang dipulangkan menggunakan KM. Lalobar pada 22 April 2011, [3] penjemputan TKI overstayers yang tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

RAPAT PARIPURNA DPR TANGGAL 16 DESEMBER

Agenda pertama, laporan Pansus RUU tentang Pengadaan Tanah, menjelaskan perubahan judul RUU, yaitu menjadi RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Secara garis besar, RUU ini secara komprehensif mengatur penyelenggaraan pengadaan

tanah untuk kepentingan umum melalui proses pentahapan yang pasti dan berurutan, yaitu meliputi tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diikuti dengan pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pengadaan tanah, yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Paripurna menyetujui RUU ini disahkan menjadi UU. Usulan-usulan yang berkembang di Rapat paripurna ditampung dalam Perpres.

Agenda kedua, laporan Baleg tentang Penetapan Prolegnas 2012. Tahun 2012, Badan Legislasi melalui persetujuan paripurna telah menetapkan 64 RUU sebagai prioritas, 20 diantaranya sudah dalam Pembicaraan Tingkat I, 44 sisanya adalah RUU usul inisiatif DPR dan dari Pemerintah. (Catatan: semula 66 RUU, tetapi RUU tentang Perubahan UU No 16 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan RUU tentang perubahan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat di drop).

Agenda ketiga, dalam Laporan Tim Pengawas Kasus Bank Century disampaikan bahwa penanganan kasus korupsi oleh KPK belum mencapai hasil atau perkembangan yang berarti dan masih terjadi perbedaan pandangan Tim Pengawas atau rekomendasi DPR dengan pandangan KPK. Sampai dengan akhir tahun 2011, KPK tetap berpendapat belum menemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, yang merupakan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal Tim Pengawas berpandangan bahwa sudah sangat jelas adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam penanganan Bank Century. Sedangkan penanganan kasus tindak pidana umum, perbankan, pencucian uang, penggelapan, dan penipuan yang terkait dengan kasus bank Century mengalami kema-



juan meski penanganannya belum tuntas. Tim Pengawas Kasus Bank Century merekomendasikan: [1] memperpanjang masa kerja Tim Pengawas Kasus Bank Century sampai akhir desember 2012; [2] Tim Pengawas Kasus Bank Century sangat perlu memfokuskan kinerja pada pengembalian aset; [3] mengingat penanganan kasus korupsi oleh KPK belum mencapai hasil atau perkembangan berarti, dan KPK belum menemukan bukti-bukti telah terjadi tindak pidana korupsi, Tim berpendapat perlu dipikirkan solusi mengatasi hal tersebut, dan memberikan waktu kepada KPK sampai pertengahan 2012 untuk menetapkan status kasus Bank Century. Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat, Pimpinan dewan memutuskan Tim Pansus diperpanjang sampai tahun 2012. Tentang waktu, diserahkan kepada Pimpinan DPR sesuai kewenangan yang diberikan tata tertib pasal 98.

Sementara agenda keempat, pada Pidato Penutupan Masa Sidang II, Ketua DPR menyampaikan antara lain bahwa kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini baik yang terjadi di Papua terhadap aparat Kepolisian oleh kelompok bersenjata (OPM) dan pembunuhan/pembantaian petani di Mesuji, Lampung dan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sangat memprihatinkan dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar HAM. “Tumpang tindih” kepemilikan lahan dan perebutan lahan antara warga dengan investor telah menjadi pemicu sengketa. Terhadap pengaduan ini, Komisi III akan melakukan tindak lanjut, mengunjungi lokasi dan mendapatkan keterangan atas kasus ini. Dewan meminta kepada aparat Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi lahan-lahan yang diperuntukkan bagi investor yang tidak memperhatikan prinsip keadilan. Ketua DPR juga menyampaikan selamat atas keberhasilan Sea Games ke-26 di Palembang dan Jakarta, Dewan menyampaikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih dan ofisial yang telah mengharumkan nama Indonesia, penghargaan atas suksesnya KTT ASEAN, dan selamat natal bagi umat kristiani, serta selamat tahun baru 2012.

KEGIATAN LAIN

Pada tanggal 15 Desember, secara berturut-turut Ketua DPR-RI di dampingi Ketua BKSAP DPR-RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Rakyat China H.E. Zhang Qiyue dan Duta Besar Arab Saudi H.E. Abdulrachman M.A. Al-Khayyat dalam rangka pamit karena tugasnya sebagai Dubes akan berakhir.

Dalam pertemuan tersebut Dubes Zhang Qiyue, memaparkan hubungan bilateral Indonesia-China dan berbagai aspek yang meliputi kerjasama ekonomi perdagangan termasuk kerjasama dalam rangka ASEAN-China Free Trade Agreement. Dubes Zhang Qiyue lebih lanjut mengatakan hubungan bilateral antar pemerintah yang telah berjalan dengan baik akan terus ditingkatkan demikian pula *people to people relations* antara kedua bangsa akan terus ditingkatkan untuk mempererat persahabatan masyarakat kedua bangsa. Ketua DPR-RI, membenarkan hubungan erat yang telah terbina antara Indonesia dan China, termasuk hubungan ekonomi perdagangan dan kerjasama bidang-



bidang lain, mengalami kemajuan. Namun oleh Ketua DPR-RI ditegaskan perlunya ada keseimbangan nilai dan volume perdagangan antara kedua negara, khususnya dalam rangka AC-FTA. Menjaga keseimbangan nilai dan volume perdagangan adalah penting dalam rangka memperoleh manfaat bersama. Perlu realisasi pengiriman guru bahasa mandarin ke Indonesia, sebagaimana yang sudah pernah dibicarakan dengan Ketua NPC H.E. Wu Bangguo. Sementara, dalam rangka memajukan *people to people relations*, Ketua BKSAP mengingatkan perlunya peningkatan pemberian beasiswa oleh pemerintah China bagi pelajar muslim Indonesia untuk belajar di China sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Demikian pula sebaliknya, Indonesia welcome menerima pelajar muslim China untuk belajar agama Islam di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Dubes Arab Saudi, disinggung berbagai persoalan seperti masalah TKI yang upaya penyelesaiannya telah mengalami kemajuan. Selain itu, disebutkan tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang selalu diperbaiki juga soal penetapan quota haji yang jumlahnya terus meningkat. Dubes Abdulrachman mengatakan, permintaan visa haji Indonesia terus meningkat dan selama 5 tahun bertugas di Indonesia ia telah mengeluarkan sebanyak lebih dari satu juta visa haji Indonesia. Ketua DPR-RI mengatakan bahwa masalah TKI di Arab Saudi memerlukan kerjasama kedua negara untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Sementara Ketua BKSAP menyambut baik keinginan dan upaya pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan hubungan antar parlemen kedua negara. Ketua DPR-RI menyampaikan harapannya agar Arab Saudi yang memiliki pengaruh di Liga Arab dapat mendorong negara-negara anggota PUIIC dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam Konferensi PUIIC ke-7 di Palembang tahun 2012.*

DPR Temukan Pemkot Padang Lakukan Sejumlah Pelanggaran

Tim Pengawas DPR RI Terhadap Penanggulangan Bencana Alam (TPPBA) Propinsi Sumatera barat menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang sehubungan dengan pasca gempa 30 September 2009.



Koordinator TP-PBA Sumbar Refrizal (kiri) memberikan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan)

Seperi diketahui pada kesepakatan awal Pemkot akan menyediakan kios penampungan yang layak sesuai dengan jumlah pedagang, namun realisasinya kios penampungan baru disediakan sebagian dan kondisinya pun tidak layak.

“Dari 1076 jumlah pedagang yang ada, baru 484 yang mendapat kios penampungan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Pasar Inpres II, III, IV Petak Bata dan Petak Bagonjong,” ungkap Refrizal selaku Koordinator TP-PBA Sumbar di depan rapat paripurna DPR RI, Selasa 13/12.

Lebih lanjut di kemukannya karena kios penampungan masih belum memadai, para pedagang belum dapat menempati tempat tersebut. Sedangkan dalam kesepakatan Pemkot Padang dengan pedagang, Pedagang menempati kios penampungan yang disediakan selambat-lambatnya lima hari setelah penandatanganan kesepakatan.

Pada rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan

tersebut, Refrizal menyatakan ditemukan pula terjadi sengketa tanah dimana hak pedangan yang menempati kios sentral Pasar Raya, menjadi hilang karena kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan Pemkot Padang untuk membangun Neo Sentral Pasar Raya.

Proses perizinan dan pembangunan gedung Neo Sentral Pasar Raya Plaza dengan anggapan hapusnya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pasca gempa dan penggunaan klain asuransi gedung Sentral pasar Raya untuk membangun Neo Sentral Pasar Raya secara arif dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 huruf a UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Alokasi dana korban gempa melalui BNPB sebesar Rp. 6,4 Triliun tidak sampai seluruhnya ke masyarakat. Dana yang sampai hanya kurang dari Rp 3 Triliun. Sedangkan sisanya tidak melalui BNPB, tapi melalui anggaran sektoral yang sulit dipenuhi karena birokrasi yang berbelit-belit. Gubernur Sumbar telah tiga kali mengirim surat agar segera dana gempa tersebut disa-

lurkan melalui BNPB Sumbar sebelum jangka waktu dua tahun pasca gempa.

Minta perpanjangan masa tugas

TPPBA Sumbar memandang perlu untuk melanjutkan masa tugas pengawasan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar dan Mentawai pasca bencana alam, terutama di bidang infrastruktur, sarana prasarana pemerintah daerah dan pusat, sarana ibadah, ekonomi dan kesehatan serta pendidikan. Masih ada dana Gempa Sumbar tahap IV tahun 2011 sebesar 300 miliar yang hingga kini proses pencairannya belum selesai yang jika pada akhirnya dana tersebut cair hal ini tentu menuntut pengawasan TPPBA pada tahun 2012

Terjadinya bencana alam susulan yakni banjir bandang di pesisir selatan, yang pada masa tanggap darurat saat ini memerlukan dana lebih 12,5 miliar. (Issmeg)

Paripurna DPR Sahkan RUU Prioritas 2012

Rapat Paripurna DPR RI (Jum'at 16/12) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung telah berhasil mensahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono mengatakan, dari 147 judul RUU usulan DPR dan 29 judul RUU usulan Pemerintah, Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM sepakat untuk menetapkan 66 judul RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012.

Ke 66 RUU tersebut adalah, 20 RUU yang sedang dalam pembahasan Tingkat I, 29 RUU berasal dari DPR dengan perincian 16 RUU akan diinisiasi Komisi dan 13 RUU akan diinisiasi oleh Badan Legislasi, dan 17 RUU berasal dari Pemerintah.

Selain 66 judul RUU yang ditetapkan sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, telah disepakati juga 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka yaitu, RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, RUU Kumulatif Terbuka tentang APBN, RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Pengesahan RUU Prioritas 2012 ini diwarnai banyak interupsi. Pimpinan Komisi III minta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di drop dari Prioritas 2012 karena Komisi III tidak pernah mengusulkannya.

Sementara Komisi IX DPR juga minta RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di drop.

Rapat Paripurna DPR akhirnya memutuskan dua RUU tersebut di drop sehingga jumlah RUU Prioritas 2012 yang tadinya berjumlah 66 RUU menjadi 64 RUU.

Dalam kesempatan tersebut, Mulyono juga melaporkan disepakatinya



Jajaran Pimpinan DPR RI saat sidang Paripurna DPR RI

oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM untuk menampung RUU Non Prolegnas yaitu, RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat/ RUU tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat dan RUU tentang Keinsinyuran.

Mulyono menambahkan, dalam Prolegnas RUU Prioritas 2011 ditetapkan 70 judul RUU dan 21 judul RUU luncuran pembahasan dari tahun 2010. Dari 70 judul RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2011 disepakati 37 RUU akan diinisiasi oleh DPR dan 33 RUU akan diinisiasi oleh Pemerintah.

Dari 37 RUU yang diinisiasi DPR, 33 RUU yang diinisiasi oleh Pemerintah perkembangan pelaksanaannya saat ini adalah 16 RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I dan akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2012.

Selain itu, 3 RUU sudah disetujui sebagai RUU usul DPR dan menunggu Supres, 1 RUU dalam tahap harmonisasi, 50 RUU yang masih dalam tahap penyusunan (dengan rincian 24 RUU dari DPR dan 26 RUU dari Pemerintah).

Dari 21 RUU yang diluncurkan pembahasannya dari tahun 2010 ke tahun 2011 terdapat 18 RUU yang telah menjadi Undang-Undang dan 3 RUU yang

sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

Data di atas, kata Mulyono, menggambarkan bahwa realisasi program legislasi nasional prioritas Tahun 2011 masih belum berbanding lurus dengan target jumlah RUU yang direncanakan untuk diselesaikan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi DPR dan Pemerintah antara lain, tingkat penyelesaian penyusunan RUU yang berjalan sangat lambat baik di DPR maupun di Pemerintah.

Kendala lainnya, terdapat sejumlah RUU yang tertunda pembahasannya (deadlock) karena adanya ketidaksepahaman antara Pemerintah dengan DPR, atau adanya ketidaksepakatan antar kementerian/LNK yang ditugaskan membahas RUU.

Selain itu, juga ketaatan terhadap pemenuhan jadwal legislasi masih kurang, sehingga menyulitkan tercapainya kuorum dan pada akhirnya menunda pembahasan.

Mulyono menyadari beban legislasi yang diambil oleh DPR dan Pemerintah tahun 2012 sangat berat. Namun dia optimis dengan dukungan semua pihak kinerja legislasi DPR dapat mencapai target yang diharapkan. (tt)foto:ry

Komisi X DPR RI Menilai Babel Miliki Peluang Wisata Bagus

Utut Adianto Ketua Tim Kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung menilai Provinsi Bangka Belitung (Babel) memiliki peluang pariwisata yang cukup bagus, karena memiliki banyak potensi wisata yang tidak kalah menarik dengan Bali dan Lombok.



Ketua Tim Kunjungan Komisi X DPR RI Utut Adianto

“Komisi X DPR RI sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata, sehingga wisatawan asing dan mancanegara berminat ke Pulau Bangka dan Belitung,” kata Utut dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah dan pelaku pariwisata Babel, di Pangkalpinang beberapa waktu lalu.

Utut mengemukakan, sektor pari-

wisata memiliki peluang yang bagus untuk dikembangkan karena mampu menghasilkan devisa bagi daerah dan negara sekaligus mengangkat perekonomian rakyat setempat.

Untuk sektor pariwisata di Indonesia sekarang ini masih terbatas perkembangannya di Bali, Jawa Tengah dan Lombok, sementara di daerah lain seperti di Babel yang juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik

belum maksimal dikembangkan.

Sementara untuk bisa menjadikan daerah sebagai sasaran wisatawan harus berani mempromosikan, memperkenalkan dan mendorongnya menjadi sektor pariwisata yang baru.

“Jika membedah lebih jauh wisatawan mancanegara pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai Rp7 juta lebih sehingga menghasilkan sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1000 dolar Amerika Serikat per orang,” imbuhnya.

Untuk bisa terealisasi Babel sebagai daerah tujuan wisatawan harus didukung dengan fasilitas dan transportasi yang memadai seperti Bandara Internasional.

Kemudian untuk di Babel yang paling menonjol adalah “Negeri Laskar Pelangi” yang beralokasi di Pulau Belitung dan terkendala dengan minimnya transportasi udara ke daerah tersebut dan secepatnya harus bisa ditanggulangi bagi maskapai penerbangan.

Kondisi alam di Belitung sangat mendukung untuk menjadi sasaran pariwisata, namun sayang dari segi fasilitas di Belitung masih sangat kurang mendukung. (sc) foto:sc/parle

Rumah Aspirasi Bukan Membangun Gedung Baru

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Pius Lustrilanang (F-Gerindra) mengatakan program Rumah Aspirasi yang digagas BURT bukan hendak membangun gedung di seluruh daerah untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Hal itu dikatakan Pius saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin beserta jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Wakil Ketua

DPRD prov. Kalsel, Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan, Rektor Univ. Lambung Mangkurat, dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gedung Graha Abdi Persada kantor Gubernur Kalsel (23/11).

Pius menjelaskan, yang dimaksud dengan Rumah Aspirasi adalah fungsinya bukan bangunan fisiknya. Rumah Aspirasi adalah wadah atau tempat bagi para anggota DPR RI yang berasal dari satu daerah pemilihan (dapil) un-

tuk menampung, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di dapil tersebut. “Jadi, tempatnya tidak harus gedung permanen, bisa berupa kios, warung, atau rumah yang disewa,” jelasnya.

Lebih lanjut Pius memaparkan, kunjungan perorangan ke dapil yang selama ini berlangsung izinnnya bukan dari Sekretariat Jenderal DPR RI melainkan dari Fraksi. “Ketika anggota DPR berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sering kali pemerintah daerah tidak mau membantu karena mereka menganggap kunjungan itu tugas fraksi atau partai,” katanya.

Mantan aktivis di masa orde baru ini menambahkan, menurut UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD/DPD dan Tata Tertib DPR RI, selain mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, setiap anggota DPR juga mempunyai kewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Salah satu tujuan pertemuan ini adalah dalam rangka mencari format terbaik dalam penyerapan aspirasi masyarakat.



Pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin beserta jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Wakil Ketua DPRD prov. Kalsel, Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan, Rektor Univ. Lambung Mangkurat, dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan

Trans Kalimantan

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin menyambut baik pertemuan yang digagas BURT ini, dalam rangka mendukung penguatan fungsi DPR RI melalui program penyerapan aspirasi masyarakat. Pada kesempatan ini gubernur juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah lama disuarakan, di antaranya proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan yang tidak kunjung rampung, padahal jalan ini sangat penting artinya bagi kelancaran bagi arus barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. “Jalan Trans Kalimantan ini sudah dibangun saat saya masih muda, hingga saya menjadi gubernur seperti sekarang ini, jalan itu belum jadi juga,” paparnya.

Gubernur menambahkan, masyarakat Kalimantan hingga saat ini merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, karena begitu banyak sumber daya alam yang dimiliki disumbangkan untuk bangsa dan negara, tetapi yang diberikan negara kepada rakyat Kalimantan tidak sebanding. “Minyak,

batubara, dan gas yang ada di bumi Kalimantan digali untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi listrik di wilayah kami sering mati,” keluh Rudy Arifin. “Resources kami besar, tetapi representasi kami kecil,” tambahnya. Gubernur berharap jalan Trans Kalimantan dapat diselesaikan paling lambat tahun 2015, sehingga masyarakat Kalsel tidak harus transit ke Jakarta terlebih dahulu jika hendak ke Pontianak seperti saat ini.

Menanggapi keterangan gubernur Kalsel, anggota BURT yang juga anggota Komisi V DPR RI, Hj. Sadarestuwati (F-PDIP) menjelaskan, salah satu kendala lambatnya penyelesaian jalan Trans Kalimantan adalah masih banyaknya hambatan dalam pembebasan lahan dan rencana pembangunan beberapa jembatan penghubung di sejumlah daerah. Sadarestuwati menambahkan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan ke-PU-an telah menyetujui anggaran infrastruktur untuk Kalimantan termasuk proyek Trans Kalimantan pada APBN

2012. “Komisi V selalu mendukung masyarakat Kalimantan, bahkan anggaran di APBN bagi Kalimantan tahun 2012 cukup besar untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan termasuk jalan Trans Kalimantan,” ujarnya menjelaskan.

Selain melakukan pertemuan dengan gubernur Kalsel, Bupati/Walikota, dan tokoh masyarakat Kalsel, Tim BURT DPR RI juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Turut serta pada kunjungan kali ini anggota BURT DPR RI : Agung Budi Santoso, Lucy Kurniasari, dan H.Heriyanto (F-PD), Bambang Sutrisno, Hj. Hernani Hurustiati, Hj. Oelfah A. Syahrullah H., dan Muhammad Luthfi (F-PG), H. Surya Chandra Surapaty dan Hj. Sadarestuwati (F-PDIP), Amran, M. Ichlas El-Qudsi dan HM. Syafruddin (F-PAN), HM. Arwani Thomafi dan Irna Narulita (F-PPP), Muhammad Toha (F-PKB), dan Putih Sari (F-Gerindra). (Rn.Tvp)

Kampus Unlam Siap Menjadi Rumah Aspirasi

Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) salah satu perguruan tinggi ternama di provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung program Rumah Aspirasi yang akan dijalankan oleh DPR RI, bahkan siap menjadi Rumah Aspirasi tersebut.



Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT DPR Pius Lustrilang memberikan cinderamata DPR kepada perwakilan Universitas Banjarmasin.

Hal itu mengemuka dalam diskusi antara Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan jajaran pimpinan dan staf pengajar Unlam Banjarmasin yang berlangsung di lantai 2 Gedung Rektorat, Kamis (24/11).

Pembantu Rektor III Unlam Prof. Dr. Ir. H. Idianor Mahyuddin, M.Si. mengatakan, pertemuan dan diskusi yang dilakukan adalah dalam rangka mencari model terbaik penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPR RI. "Kami bangga dan mendapat kehormatan menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipilih BURT untuk menyumbangkan pemikiran," tukasnya.

Lebih lanjut Prof. Idianor mengatakan mekanisme penyampaian aspirasi yang sudah dilakukan DPR selama ini, baik melalui alur langsung seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan audiensi maupun alur tidak langsung melalui surat menyurat, laman atau website, SMS dan hotline pengaduan sebenarnya sudah cukup

baik. Tetapi yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan aspirasi yang telah disampaikan. "Apakah aspirasi tersebut diterima atau ditolak, dan sudah sampai di mana perkembangan aspirasi itu seharusnya masyarakat bisa mengetahuinya secara transparan dan aspiratif," ujarnya mengharapkan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI, Pius Lustrilang mengatakan konsekuensi Pemilu dengan metode suara terbanyak adalah semakin kuatnya ikatan antara anggota DPR dengan konstituen dari daerah pemilihannya. Terpilih kembali atau tidaknya seorang anggota DPR sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Pius memaparkan penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPR melalui Komisi selama ini sudah berlangsung dengan baik melalui RDPU, audiensi, dan kunjungan kerja Komisi, tetapi kunjungan kerja per-

orangan belum berjalan secara efektif dan optimal, karena ijinnya melalui fraksi bukan Sekjen DPR RI. Padahal anggota dewan tersebut menjalankan tugasnya. Akibatnya, saat seorang anggota DPR berkoordinasi dengan pemda di dapil di mana anggota dewan itu berasal, maka pemda tidak dapat membantu. "Pemda menganggap kunjungan itu membawa kepentingan fraksi atau partai," ujarnya. Untuk itulah BURT melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dalam rangka mencari model terbaik dalam penyaluran aspirasi.

Wakil Ketua BURT DPR RI ini menjelaskan selain sekat fraksi, sekat komisi juga terkadang menjadi kendala dalam penyaluran aspirasi, mengingat kewenangan seorang anggota DPR juga ditentukan pada komisi tempat anggota dewan berada. "Seorang anggota Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, akan sulit mewujudkan aspirasi masyarakat dapilnya terkait persoalan kesehatan maupun pendidikan," tukasnya memberi contoh. Untuk mengatasi persoalan seperti itu maka diperlukan suatu wadah atau tempat di mana anggota-anggota DPR yang berasal dari dapil yang sama secara bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakatnya tanpa sekat fraksi dan komisi.

Dengan adanya rumah aspirasi sebagai wadah atau kantor bersama, maka penyerapan dan tindak lanjut aspirasi dapat berjalan lebih efektif. Pius mengatakan, rumah aspirasi bukan membangun kantor baru, tetapi bisa berupa kios atau rumah yang disewa. "Yang penting adalah fungsinya," tegas Pius. "Dengan rumah aspirasi menjadi semacam sekretariat bersama, maka para anggota DPR dari satu dapil yang sama dipaksa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat

dapilnya tanpa sekat-sekat komisi dan fraksi,” tambah Pius.

Terkait anggaran rumah aspirasi, Pius menegaskan BURT telah menyepakati anggarannya diambil dari optimalisasi anggaran DPR saat ini. “Jangan khawatir soal anggaran, karena DPR tidak akan mengajukan anggaran khusus untuk rumah aspirasi,” ujar Pius meyakinkan.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup hangat itu sejumlah dosen dan

pimpinan program studi Unlam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Muhammad Fahri, dosen Komunikasi FISIP Unlam mengatakan, perguruan tinggi adalah salah satu institusi yang masih dipercaya independensinya. Fahri menyarankan agar DPR mengandeng perguruan tinggi untuk menjadi semacam dapur bagi rumah aspirasi. “Kami bisa menjadi dapur bagi penyerapan aspirasi masyarakat, kami yang memilah dan mempelajari, DPR

tinggal terima matangnya,” ujarnya menawarkan. Prof. H. Wahyu guru besar Ilmu Sosiologi Unlam menambahkan, rumah aspirasi bisa berbentuk forum komunikasi atau forum musyawarah, bisa berbentuk kelompok capir seperti pada masa orde baru, bisa juga berupa musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. (Rn.Tvp) foto: tim parle

Warga Lampung Adukan Kasus Pengusiran Berdarah kepada Komisi III

Perwakilan warga masyarakat Mesuji, Lampung mengadukan kasus pengusiran warga dari lahan pertanian mereka oleh petugas keamanan perusahaan perkebunan yang diduga didukung oknum aparat kepolisian. Pengusiran itu dibarengi intimidasi, kekerasan, pembunuhan bahkan pemerkosaan terhadap warga yang menolak untuk meninggalkan kebun mereka.

“Warga yang menolak pindah dianiaya bahkan dibantai, tempat ibadah warga dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Oknum aparat juga pemerkosaan terhadap janda, pada saat pengusiran,” kata pengacara warga Bob Hasan saat menyampaikan aspirasi di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/11).

Mantan anggota DPR, Mayjend (Purn) Saurip Kadi yang turut mendampingi warga menyebut teror dan pembantaian sadis dilakukan PAM Swakarsa yang dibentuk perusahaan perkebunan PT Silva Inhutani. “Kekerasan yang dialami warga Lampung ini sudah terbilang sadis. Karena korban tewas dengan cara dibantai,” tandasnya. Pengusiran berdarah ini menurutnya langkah dari perusahaan untuk memperluas perkebunan mereka

Dalam kesempatan diperlihatkan rekaman video yang menunjukkan aksi kekerasan berdarah terhadap warga, pemenggalan kepala, pembakaran rumah penduduk, serta terlihat pula seseorang berseragam dengan senjata laras panjang yang diduga oknum Polri. Disampaikan pula sepanjang tahun 2009 sampai 2011 pengusiran berdarah ini mengakibatkan 30 korban meninggal dunia dan ratusan

warga terluka.

Pada bagian lain salah seorang perwakilan warga dari desa Simpang Pematang, Mesuji, Mathias Nugroho menjelaskan kekerasan yang berlangsung mengakibatkan setidaknya 120 warga telah ditahan aparat kepolisian. Ia meminta anggota Komisi III DPR untuk mendesak Kepolisian memberi perlindungan kepada warga. “Hingga saat ini warga terus dihantui rasa takut,” paparnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo yang memimpin jalannya persidangan menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan warga Mesuji, Lampung tersebut. “Jika benar tindakan oknum kepolisian seperti dalam tayangan video tersebut, ini merupakan pelanggaran hukum



Peta Lampung

berat. Karenanya kasus ini mesti ditelusuri dan diselidiki. Kita akan panggil Kapolri secepatnya, untuk mengklarifikasi masalah ini secepatnya,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini. Ia menambahkan patut dilakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jauh kekerasan yang jelas melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. (iky) foto:internet

Komisi V DPR RI Minta Terminal Ampelas di Renovasi

Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan meminta pemerintah untuk merenovasi Terminal Ampelas Medan di renovasi, pasalnya, dari hasil kunjungan itu, terminal terbesar di Sumut ini dinilai masih bermasalah dalam drainase juga infrastruktur hingga pelayanan.

“Setelah kami tinjau, Terminal Ampelas Medan yang merupakan terminal tipe A perlu di renovasi, untuk itu kami akan bantu memberikan dukungan serta memperjuangkan anggarannya, supaya terminal ini kedepannya lebih bagus dan nyaman bagi penumpang,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Ali Wongso HS(F-PG) bersama anggota tim lainnya yakni Iskan Qolba Lubis (F-PKS), Usmawarnie Peter (F-PD), dan Sunartoyo (F-PAN) saat meninjau Terminal Ampelas Medan, Senin (12/12)

Dalam kunjungan yang didampingi Wali Kota Medan Rahudman Harahap, itu Komisi V DPR langsung meninjau ke dalam Terminal Amplas; mulai dari pool bus hingga pemeriksaan uji kelayakan kendaraan. “Terminal Amplas ini sudah layak untuk direnovasi, mengingat terminal ini juga tipe A, termasuk pengujian kendaraan harus dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai standar yang berlaku karena ini menyangkut keselamatan penumpang,” tambahnya.

Dikatakan Ali Wongso, kunjungan ini dalam rangka untuk melihat persiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan penumpang di saat Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Sebab di akhir tahun biasanya akan terjadi lonjakan penumpang baik dari Jakarta ke Sumatera ataupun sebaliknya. Selain

itu, melihat langsung kondisi terminal yang ada di Medan.

Sebelumnya anggota Komisi V DPR RI juga meninjau lokasi rencana pembangunan fly over Jamin Ginting (Simpang Pos). “Kami berharap pembangunan fly over sudah dapat dilakukan pada 2012 dan pada 2013 harus tuntas, sehingga bisa mendukung kelancaran lalu lintas kota dari Medan ke Brastagi,” ujar Ali Wongso.

Ditambahkan anggota lainnya, Iskan Qolba Lubis pihaknya juga turut melakukan peninjauan Pelabuhan Belawan juga Bandara Polonia Medan. “Selain melihat kondisinya langsung, kami juga berkeinginan untuk mengetahui apa yang seharusnya dibenahi, sehingga infrastruktur transportasi di Medan baik dan nyaman bagi penumpang,” jelas Iskan.

Turut hadir juga dalam peninjauan itu dari Kementerian PU yakni Kasubdit Wil IB Bina Marga Kementerian PU Zamharir Basuni dan Kasatker Metropolitan Medan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Malatua.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menyambut baik kunjungan yang dilakukan anggota Komisi V DPR RI. “Kita mengapresiasi kunjungan anggota Komisi V DPR RI ini dalam rangka melihat infrastruktur kota ini. Tadi kita juga sudah meninjau jalan-jalan nega-

ra, fly over Jamin Ginting dan rencana Under Pass Titi Kuning. Tahun depan direncanakan jalan Tritura akan dilebarkan untuk mendukung pembangunan fly over Jamin Ginting sehingga bisa lebih representatif,” jelas Rahudman.

Sebelumnya, Rahudman juga sudah menyebutkan, kalau dua terminal di Medan yakni Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris pada 2012 akan segera direnovasi. Sebab, pemerintah pusat juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk renovasi dua terminal tersebut yang masing-masing Rp4 miliar.

Sejumlah Toilet KM Kelud Rusak

Setelah melakukan peninjauan ke Terminal Ampelas, Tim Komisi V DPR kembali melihat kesiapan armada angkutan di Pelabuhan Belawan, disini Tim menemukan sejumlah toilet kelas ekonomi KM Kelud tidak berfungsi.

Termuan tersebut membuat anggota dewan yang membidangi perhubungan itu merasa kaget dan tampak kecewa. “Toilet ini sangat dibutuhkan penumpang selama dalam perjalanan. Jadi PT Pelni harus segera melakukan perbaikan,” ujar Ali Wongso kepada GM PT Pelni Medan Budandi.

Dalam peninjauannya itu anggota Komisi V DPR juga meninjau fasilitas di kapal seperti tempat tidur penumpang di kelas ekonomi. Kepada pengelola KM Kelud, untuk itu DPR meminta agar pelayanan terhadap fasilitas terutama toilet lebih ditingkatkan.

Turut serta dalam kunjungan itu, Syahbandar Pelabuhan Belawan Benny Tangkuman, Direktur Operasi dan Teknik Pelindo I Medan Imam A Sulaiman, General Manager (GM) PT. Pelni Medan Budandi dan GM Pelindo Belawan Syahputera Sembiring MSM.(nt)



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR saat meninjau terminal Ampelas Medan

PT Pertamina Tidak Bisa Memasok Gas Sesuai dengan Kontrak

Kunjungan lapangan Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR Setelah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Mesan Sumatera Utara, meninjau langsung ke unit pembangkit Belawan telah menemukan permasalahan pembangkit listrik yang berbahaya bahar gas karena Pt Pertamina tidak dapat memenuhi pasokan gas yang sesuai dengan kontraknya.



Ketua Tim Komisi VII DPR Drs. H.M. Azwir Dainy Tara



PLTG Belawan Medan, Sumatera Utara

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Tim Komisi VII DPR Drs. H.M. Azwir Dainy Tara, pernyataan ini disampaikan pada saat melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan PLN di Gedung Pertemuan PLTG Belawan, Jum'at (9/12) siang.

Tim Kunjungan Lapangan Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR ke Propinsi Medan Sumatera Utara, dalam masa persidangan II tahun sidang 2011-2012 tanggal 9 s.d 11 Desember 2011 diikuti 6 orang anggota antara lain Drs. H.M. Azwir Dainy Tara (PG) sebagai Ketua Tim, Drh. Jhonny Allen Marbun (PD) anggota, Ir. Milton Pakpahan (PD) anggota, Albert Yaputra, S.Sos anggota, Drs. Ir. H. Sutan Bhatogana (PD) anggota, Dr. H. Mardani (PKS anggota).

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR Dr. Azwir Dainy Tara menambahkan, bahwa disini jelas sekali ada ketidak beresan antara PT Pertamina dengan PLN Pembangkit sektor Bela-

wan, yang semestinya Pertamina dapat memasok gas sesuai kontrak, maka PLN pembangkit sektor belawan tidak mengalami masalah seperti ini.

Azwir Dainy Tara juga mengurakan bahwa pembangkit sektor Belawan memperoleh pasokan gas dari PT Pertamina berdasarkan perjanjian jual beli gas (PJBG) pada 19 Desember 2005 dengan jangka waktu kontrak selama 10 tahun atau terpenuhinya jumlah keseluruhan yaitu sebesar 151,90 BSCF (billion kubiq feed), namun realisasi pasokan gas dari Pertamina kepada PLN untuk tahun 2009 selalu berada dibawah kontrak, dan sejak Desember 2009 s.d Desember 2010 pasokan gas dari PT Pertamina dihentikan karena terjadinya spesifikasi gas.

Dikatakan juga bahwa pasokan gas dari lapangan Glagah Kambuna (operator gas Salamander) tidak terealisasi sesuai kontrak, karena pembangkit PLN Belawan mengalami kerusakan akibat

mengkonsumsi gas yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, sehingga sumber tambahan pasokan gas diupayakan oleh PLN Belawan dari floating storage and regasification unit FSRU Belawan yang sedang dibangun PGN. FSRU tersebut memerlukan LNG sebesar 1,5 – 2 MTPA, namun hingga kina baru mendapat indikasi pasokan 1 MTPA dari BP Tangguh, kata Azwir.

Ketua Tim Panja Hulu Listrik Azwir Dainy Tara mengungkapkan, bahwa PLN sudah meminta kepada PT Pertamina EP agar Pertamina mengalirkan gas dari Pangkalan Susu sesuai dengan spesifikasi dengan PJBG, serta pengambilan dan pengujian sampel oleh Pertamina EP secara berkala 2 kali seminggu akan diikuti oleh petugas PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara, akibat belum dipenuhinya maka pengguna gas dari PT Pertamina EP tidak digunakan untuk mesin belawan. (Spy) foto:sp/pa

Angkasa Pura I Diminta Berkoordinasi Dengan TNI AU

Komisi V DPR RI meminta Angkasa Pura I (AP) untuk melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Udara (AU) untuk mencari solusi terbaik penjadwalan penerbangan.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR saat meninjau bandara Adi Sucipto Yogyakarta

Koordinasi ini perlu dilakukan, mengingat bandara Adi Sucipto padat penerbangan dengan fasilitas bandara yang masih belum memadai.

Dalam kunjungan kerja spesifik, Senin (12/12) Bambang Sutrisno yang memimpin rombongan mengatakan, permasalahan bandara yang masih menjadi satu dengan TNI AU ini sampai sekarang memang belum terpecahkan. Ini menjadi kendala besar, dimana saat pesawat mau melakukan pendaratan, karena padat maka pesawat tersebut berputar-putar dahulu menunggu sampai pesawat dapat melakukan pendaratan.

Kondisi tersebut menurut Bambang tidak dapat dibiarkan terus menerus karena selain mengganggu jadwal penerbangan, pesawat itu pun juga tidak efisien dalam penggunaan bahan bakar.

Bambang meminta pihak Angkasa Pura I dapat berkoordinasi secara intensif dengan TNI AU untuk mencari solusi yang terbaik mengatasi permasalahan tersebut. Terutama, katanya, di saat libur panjang seperti Lebaran, Natal dan

Tahun Baru jumlah penerbangan akan mengalami kenaikan.

Pada kesempatan tersebut, General Manager Angkasa Pura I Agus Adrianto mengatakan, urusan delay pesawat di bandara Adi Sucipto memang tidak bisa dihindari, mengingat bandara ini bandara TNI AU dan sehari-hari juga dipakai kegiatan penerbangan rutin angkatan udara.

Penerbangan yang dilakukan angkatan udara dalam sehari cukup padat, mencapai 70-80 per hari. Untuk urusan kepadatan jadwal penerbangan ini, pihak AP I telah berkoordinasi dengan TNI AU, tapi sejauh ini masih belum ada titik temu.

Angkasa Pura I, kata Agus, senantiasa mencari jalan terbaik untuk memecahkan permasalahan ini dan meminimalisir delay pesawat, karena dengan semakin banyaknya pesawat yang delay, daya tampung bandara untuk pesawat-pesawat tersebut juga terbatas.

Untuk persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2012, pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang. Diperkirakan lonjakan penumpang ini

akan terjadi dari tanggal 22 Desember 2011 hingga 4 Januari 2012.

Diprediksikan jumlah penumpang Natal dan Tahun Baru 2012 mencapai 93.028 penumpang dan yang berangkat 89.452 orang. Sedang prediksi pesawat yang datang selama Natal dan Tahun Baru 2012 sebanyak 700 pesawat.

Agus menambahkan, jika pesawat sering mengalami delay di bandara Adi Sucipto itu disebabkan karena berbagai alasan, diantaranya karena cuaca, VVIP movement, military training, aerobatic dan lain-lain.

Akibat delay ini akan berpengaruh pada terlambatnya penerbangan, penumpukan penumpang di terminal dan apron menjadi penuh.

Angkasa Pura I mencari solusi untuk mengatasi delay dengan cara quick handling, pesawat holding di apron TNI AU, pembatasan masuk ke ruang tunggu dan pengalihan beberapa flight/penumpang ke terminal internasional.

Sementara Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura I Gunawan Agus Suprpto menyampaikan rencana akan dilakukannya perluasan terminal yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2012 dengan nilai proyek lebih kurang Rp 90 milyar.

Perluasan yang akan dilakukan, terminal internasional digunakan untuk perluasan terminal domestik dan kantor administrasi dibongkar dan dijadikan terminal internasional.

Luas terminal saat ini 9.147 meter persegi hanya dapat menampung 1,2 juta penumpang per tahun, sedangkan trafik penumpang saat ini sudah mencapai 3,7 juta penumpang/tahun.

Gunawan menambahkan, memang ada rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo bekerjasama dengan GVK (India) dan progress saat ini sedang dilaksanakan studi kelayakan dan studi rencana induk. (tt)foto:tt/parle

Taufiq Effendi

PNPM Banyak Yang Tidak Tepat Sasaran

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digulirkan pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan/perkotaan.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi (F-PD) saat pertemuan dengan Gubernur Jambi beserta jajarannya, Walikota dan Pimpinan DPRD kota Jambi serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Bupati dan Pimpinan DPRD Kab. Muaro Jambi, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi, (5/12).

Taufiq mengungkapkan, DPR telah menyetujui anggaran PNPM sebesar 11 triliun Rupiah. Ketua Tim mengatakan anggaran yang tidak kecil ini seharusnya benar-benar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami tidak melarang di banyak tempat PNPM digunakan untuk perbaikan sekolah dan madrasah, juga TK, perbaikan gorong-gorong, jalan dan lingkungan, maupun proyek air bersih, tetapi apakah ini tepat?,” tanya Taufiq. Dia menambahkan sebanyak 75% anggaran PNPM digunakan untuk infrastruktur. “Air bersih dan perbaikan lingkungan itu urusan PU jangan dibebankan dengan PNPM ini,” tandasnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini memaparkan, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM, Komisi II akan memanggil Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. “Bayangkan saja jika dana 11 triliun itu digunakan untuk membantu permodalan usaha ibu-ibu yang membuat kue dan makanan ringan lainnya atau untuk modal berjualan, maka bisa dipastikan perekonomian masyarakat akan tumbuh,” ucapnya meyakinkan. Dia berharap PNPM betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dalam sambutannya mengatakan, sasaran PNPM Mandiri di provinsi Jambi adalah kelompok masyarakat. Semen-

tara sasaran utama program pemberdayaan masyarakat di Jambi adalah keluarga pra sejahtera atau keluarga sangat miskin yang berjumlah 34.180 KK. “Kami memiliki datanya lengkap by name-by address,” ungkap Gubernur. Salah satu program yang dijalankan pemma adalah program Bedah Rumah dan sertifikasi tanah gratis bagi 3000-an KK. “Kita juga memberi bantuan modal bagi UMKM,” katanya. “Kami berikan beasiswa untuk siswa SD 650 ribu rupiah, untuk siswa SMP 750 ribu rupiah, untuk SMA 850 ribu rupiah, dan untuk S1 2 juta rupiah,” tambahnya.

Bupati Muaro Jambi, H. Burhanuddin Mahir mengaku kaget mendengar apa yang dikatakan Ketua Tim Komisi II soal pemanfaatan dana PNPM yang tidak tepat sasaran. Burhanuddin menjelaskan, dana PNPM ini memang sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi jalan yang dibangun yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi di pedesaan. “Dengan dana 980 juta rupiah Dinas PU

hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 km, sementara dengan dana PNPM kita bisa membangun jalan sepanjang 7 km,” ungkap Gubernur. Dirinya berharap agar program PNPM ini tetap dilanjutkan terlepas dari anggapan bahwa program ini hanya untuk pencitraan. “Sebenarnya yang kami terima tidak besar hanya 18 milyar dan 120 juta rupiah, tapi hasilnya luar biasa,” tukasnya.

Disamping melakukan peninjauan ke sejumlah proyek yang didanai PNPM di provinsi Jambi, Tim Komisi II juga melakukan sidak pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di beberapa kecamatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi. Turut serta pada kunjungan kali ini Anggota Komisi II DPR RI : GRAY Koesmoertiyah (F-PD), Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), Alexander Litaay dan Zainun Ahmadi (F-PDIP), H. Rahman Amin dan H. Yan Herizal (F-PKS), Rusli Ridwan (F-PAN) dan Chairul Naim M. Anik (F-PAN), serta AW. Thalib (F-PPP). (Wrj.Tvp)



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Jambi Taufiq Effendi (kiri)

Komisi II DPR Minta KPUD Pati Segera Gelar Pilkada Ulang

Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Taufiq Effendi meminta agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pati, Jawa Tengah segera melaksanakan Pilkada Ulang, karena hal itu merupakan perintah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan gugatan pasangan calon bupati Patidari PDI Perjuangan, Imam Suroso dan Sujoko.

Permintaan keduanya agar MK membatalkan keputusan KPU Pati Nomor 40/2011 tentang penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati Pati pada 5 Juni 2011 dikabulkan oleh MK.

“Dalam amar putusannya, MK memerintahkan kepada KPUD Pati untuk melaksanakan pilkada ulang pa-ling lambat 90 hari setelah amar putusan MK ditetapkan,” ungkap Taufiq Effendi saat pertemuan dengan jajaran pemerintah kabupaten Pati dan jajaran SKPD, serta anggota KPUD dan Panwaslu, yang berlangsung di kantor bupati Pati (10/12).

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatakan, Pemilukada ulang perlu segera dilakukan agar pembangunan dapat berjalan. “Jika proses pemilukada ini berlangsung berlarut-larut maka hal ini akan menghambat jalannya pembangunan daerah, yang dirugikan adalah rakyat Pati sendiri,” tegasnya. Kepada KPU dan Panwaslu Taufiq meminta agar bekerja secara jujur dan profesional serta tidak memihak kepada salah satu calon agar dapat dihasilkan pemimpin yang baik dan legitimate. “Tugas panwas itu adalah menjagakualitas pilkada,” tandasnya.

Anggota KPUD Pati, Much. Nasich menjelaskan, KPUD telah menetapkan tanggal 19 November 2011 sebagai tenggat waktunya, tetapi karena sampai tenggat waktu anggaran tidak juga turun, maka pilkada disepakati untuk ditunda. “Pelaksanaan pilkada ulang tergantung pencairan anggaran,” tukasnya. Muh. Nasich menambahkan, ada 6 pasangan calon yang maju pada putaran pertama, 3 dari unsur partai dan 3 lainnya dari independen. Imam Suroso dan Sujoko dari PDIP tidak ikut tahap pertama, karena itulah keduanya

mengajukan gugatan ke MK yang kemudian dikabulkan dengan amar putusan MK. No. 82/PHPU-D/IX/2011.

Anggota Tim Komisi II Akbar Faisal mengatakan, KPUD harus lebih tegas menjalankan aturan main. “Untungnya masyarakat Pati sadar demokrasi, jika terjadi di daerah lain mungkin sudah terjadi konflik horisontal, ini yang kita hindari,” tukas anggota Fraksi Hanura ini. Akbar menyatakan, putaran ulang ini seharusnya tidak perlu terjadi jika KPUD-nya memiliki kecakapan dan ketegasan. “Saya mencurigai adanya ‘permainan’ antara pasangan calon tertentu dengan KPU,” ujar mantan anggota Pansus Century ini.

Anggota Tim Komisi II, HM. Gamari Sutrisno (F-PKS) mempertanyakan jika anggaran sudah tersedia dan ada perintah MK mengapa setelah 90 hari putaran ulang tidak dapat terlaksana. “Mudah-mudahan tidak terjadi konflik sosial. Jangan sampai pembangunan terhenti hanya karena persoalan pilkada yang tak kunjung usai,” ujarnya. Kepada KPUD Gamari meminta agar profesional, independen, dan tidak memihak ke mana-mana. “Ini tugas mulia, jangan sampai dikhianati,” harapnya.

Selain melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah kabupaten Pati, KPUD dan Panwaslu, Tim Komisi



SABTU PAHING, 23 JULI 2011

PemiluKada Kabupaten Pati 2011

Il juga melakukan peninjauan pelaksanaan e-KTP di Kab. Patidan memantau pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada Kab. Batang, Jawa Tengah. Turut serta pada kunjungan kali ini anggota Komisi II, Gede Pasek Suardika (F-PD), Hj. Nurokhmah A. Hidayat Mus (F-PG), Hj. Mestariy Habie (F-Hanura), dan Agoes Poernomo (F-PKS). (Irp.TvP) Foto maskot :KPUD Pati

PT KAI Diminta Sosialisasikan Sistem Baru Pada Masyarakat

Komisi V DPR RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemberlakuan okupansi. Sistem baru yang diberlakukan PT KAI ini harus segera disosialisasikan agar masyarakat tahu kebijakan baru ini.

Anggota Komisi V DPR Bambang Sutrisno menyampaikan hal ini saat pertemuan dengan PT KAI dan jajarannya dalam serangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (12/12).

Bambang menambahkan, Komisi V DPR mendukung pemberlakuan sistem ini untuk membatasi kapasitas angkut guna mempertahankan kenyamanan penumpang.

Sistem baru ini akan memberlakukan tidak ada satu pun penumpang yang berdiri, semua penumpang mendapatkan tempat duduk dan jika seat sudah habis, maka ticket tidak akan dijual lagi.

Sistem ini, kata Bambang, berlaku bukan hanya di kereta api kelas eksekutif saja, tapi juga berlaku untuk kereta api kelas bisnis dan kereta api kelas ekonomi.

Bambang berharap sosialisasi ini dapat dilakukan secara intensif, agar masyarakat mengerti betul jika tempat duduk sudah habis, tidak diperbolehkan lagi berdiri dalam kereta. Sosialisasi ini juga perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan mematuhi peraturan yang ada, kenyamanan dan keamanan penumpang akan lebih terjamin.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta Bambang Eko Martono menyampaikan, wilayahnya telah mempersiapkan angkutan kereta api menghadapi libur Natal dan Tahun Baru dimulai dari 21 Desember 2011 hingga tanggal 5 Januari 2012.

Menurut Eko, prediksi lonjakan penumpang diperkirakan pada hari Senin 26 Desember atau H+1 dengan volume penumpang 10.287 orang.

Adapun ketersediaan tempat duduk masa angkutan Natal 2011 dan

Tahun Baru 2012, untuk kereta api eksekutif jumlah tempat duduk yang disediakan per hari 2.300 seat, kereta api bisnis 2.358 seat dan kereta api ekonomi 3.398 seat.

Jika kapasitas tersebut masih kurang, PT KAI akan menambah kereta api tambahan yang semuanya kelas eksekutif dengan kapasitas yakni Argo

dilayani pada H-40 untuk KA Eksekutif dan Bisnis, H-7 untuk KA Ekonomi di stasiun On Line, pusat reservasi, agen resmi dengan sistem on line, kantor pos, call centre, maupun Indomart.

Tiket on line ini mudah didapatkan dan bisa dibeli dimana saja untuk memudahkan penumpang membeli karcis. Pembelian melalui on line ini



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR saat meninjau stasiun kereta api di Yogyakarta

Dwipangga Ekstra 350 seat, Sancaka Ekstra 250 seat dan Argo Lawu Ekstra 350 seat.

Eko menambahkan, pemberlakuan okupansi ini bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Jika dulu kereta api kelas ekonomi dapat mengangkut penumpang lebih kurang 150%, dengan pemberlakuan sistem ini semua kelas dibatasi mengangkut maksimal 100 persen penumpang.

Pemesanan tiket, kata Eko, dapat

juga suatu bentuk peningkatan pelayanan PT. KAI, selain juga untuk meminimalisir para calo. Sampai sekarang, agen on line sudah mencapai 23 agen.

Diakuinya, dengan penerapan Okupansi ini, penumpang kereta api ekonomi akan mengalami penurunan. Namun kebijakan ini harus didukung untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna kereta api bukan hanya untuk kelas eksekutif, tapi juga di kelas ekonomi. (tt) foto:tt/parle

Pokja Wartawan DPRD Jatim Studi Banding ke DPR

22 orang wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan yang biasa melakukan tugas jurnalistik di Kantor DPRD Jawa Timur (Jatim) di Surabaya melakukan kunjungan studi banding ke Gedung DPR RI.



Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekjen DPR RI Djaka Dwi Winarko (kiri tengah)

Mereka ingin mengetahui bagaimana dinamika kerja para awak media melakukan tugas peliputan kegiatan wakil rakyat di Senayan, serta hubungan kerja wartawan dengan jajaran birokrasi Setjen DPR RI.

“Ternyata wartawan peliput disini banyak sekali ya, 100 orang lebih. Kami ingin tahu bagaimana teman-teman wartawan di DPR RI bekerja, mengatur peliputan di gedung wakil rakyat,” kata Hidayat wartawan harian Memorandum, Surabaya setelah mendapat penjelasan Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekjen DPR RI Djaka Dwi Winarko dalam pertemuan di ruang wartawan Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12/11).

Djaka juga memaparkan tantangan kerja sebagai birokrasi bekerja sama dengan wartawan yang kadang dianggap sebagai entitas merdeka. “Kata kuncinya komunikasi, yang penting saling memahami. Dalam kebijakan berita kami tidak pernah ikut campur, hanya meminta wartawan untuk melakukan cover both side, bahkan kalau bisa cover all side. Mengkritik boleh tapi dalam konteks membangun kelembagaan DPR ini,” ujarnya.

Secara berkala dua kali dalam setahun tambahnya kesekjen melakukan kegiatan pembekalan kepada wartawan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsi DPR. Persiapan dan pelaksanaannya selalu melibatkan pengurus koordinatariat, terutama menyangkut bahasan yang

diperlukan wartawan dalam kegiatan yang disebut press gathering tersebut.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Ketua Koordinatariat Wartawan Parlemen MPR/DPR/DPD, Gusti Lesek serta beberapa anggota koordinatariat dari beberapa media. Ia menjelaskan hubungan kerja wartawan yang berasal dari berbagai media cetak dan elektronik ini secara formal sudah diatur dalam tata tertib yang disusun dan ditetapkan bersama. “Kita sudah punya Tata Tertib Wartawan Koordinatariat Parlemen, aturan dari kita, oleh kita dan untuk kita wartawan yang meliput di Gedung DPR, MPR dan DPD. Jadi kalau ada apa-apa kita kembali ke Tatib saja,” tekannya.

Ari dari Radio Mercury Surabaya dan Siti dari Harian Birawa menanyakan tentang diskusi yang dikelola wartawan parlemen yang sering menjadi pemberitaan media. “Saya ingin tahu lebih jauh tentang pengelolaan diskusi mingguan yang dilaksanakan. Kami juga ingin mencobanya di Surabaya.”

Gusti yang juga wartawan harian Suara Pembaruan ini menyebut diskusi Dialektika Demokrasi merupakan agenda wajib wartawan DPR setiap minggunya. “Kita laksanakan setiap hari Kamis, dua hari sebelumnya kita sudah menghimpun masukan dari teman-teman wartawan lewat milis. Tema yang paling banyak diusulkan itulah yang kita usung dalam diskusi,” jelasnya.

Ia juga menyebut pihak kesekjen membantu menyediakan honor terutama bagi nara sumber yang kita undang dari luar seperti akademisi dari perguruan tinggi atau LSM. “Kita bebas mengelola diskusi ini, tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan kita bebas mengkritisi Ketua DPR,” demikian Gusti. (iky) foto: iky

Dubes China Pamit ke Ketua DPR

Ketua DPR RI, Marzuki Alie menerima kunjungan duta besar China, Zhang Qiyue dalam rangka berpamitan karena telah menyelesaikan tugasnya selama 3,5 tahun sebagai Duta Besar China untuk di Indonesia. Pada kunjungan kali ini Marzuki Alie ditemani oleh Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid di Ruang Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kamis (15/12).

Dalam kunjungannya, Zhang Qiyue menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan oleh Parlemen Indonesia selama ia menjabat sebagai Duta Besar China. Ia mengatakan, selama dirinya bertugas menjadi duta besar banyak peningkatan kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan China.

“Tentunya dengan semakin banyaknya peningkatan kerjasama antar kedua negara memberikan keuntungan yang banyak bagi Indonesia, dan tentunya tidak jarang komisi-komisi di DPR yang berkunjung pula ke China,” jelasnya.

Zhang Qiyue menuturkan, hubungan yang selama ini terjalin antara Indonesia dengan China telah terbina dengan sangat baik, dan itu berkat kedekatan yang terjalin antar pemerintahan kedua negara maupun antar Parlemen, dan ia sangat berharap hubungan ini dapat terus berlanjut. “Kami menginginkan hubungan ingin akan terus membaik dan semakin erat antar kedua negara, dan tidak terputus disini saja, perekonomian China pada akhir tahun diperkirakan telah melebihi nilai perdagangan hingga 50 miliar US\$,” tuturnya.

Dengan kenaikan nilai tersebut, tentunya dapat terlihat hubungan yang semakin membaik diantara kedua negara, dan tidak hanya di bidang perekonomian, China ingin memperlebar hubungannya di bidang Infrastruktur, Manufaktur, Agrikultur, maupun Pendidikan.

Dalam Bidang Pendidikan, Marzuki



Duta Besar China untuk Indonesia Zhang Qiyue (kiri) saat bertemu dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie

Alie menginginkan adanya penambahan guru bahasa Mandarin dari China yang di datangkan ke Indonesia, agar masyarakat Indonesia pun bisa mahir berbahasa mandarin. “Tentunya jika semakin banyak masyarakat Indonesia yang mahir berbahasa Mandarin, akan semakin mempererat pula hubungan kedua negara karena dipermudah dengan komunikasi,” jelasnya.

Menurut Zhang Qiyue, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang telah belajar bahasa mandarin, dan dalam setahunnya pemerintah mandarin telah mengirimkan 100 orang guru sukarelawan bahasa mandarin ke Indonesia, tetapi tentunya belum memadai karena besarnya jumlah masyarakat Indonesia.

Selain itu Marzuki menambahkan

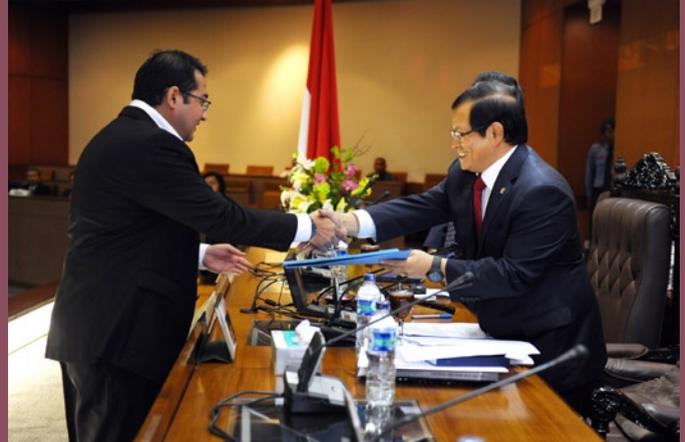


Ketua DPR RI Marzuki Alie

perlu adanya penambahan program beasiswa untuk pertukaran pelajar diantara kedua negara agar semakin bertambahnya pertukaran ilmu maupun budaya di kedua negara. (ra)foto:parle



Kunjungan lapangan Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Mesan Sumatera Utara, di unit PLTG Belawan. 9 Desember 2011 foto:SP



Kunjungan Lapangan (Kunlap) Komisi VII DPR ke PT. Intech Anugrah Indonesia (IAI), Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah. 14 Desember 2011. foto:IW



Pelantikan K. Johnson Rajagukguk, SH., M.Hum sebagai Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI. 16 Desember 2011 foto:RY



Penandatanganan draft Rancangan Undang Undang Pendebebasan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Panitia Khusus DPR untuk RUU tersebut dan Pemerintah. 14 Desember 2011. foto:RY